

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pendidikan merupakan kebutuhan manusia yang bersifat universal yang artinya seluruh umat manusia membutuhkan pendidikan dalam hidupnya.¹ Pendidikan merupakan kunci suatu bangsa untuk membangun peradabannya. Peradaban yang bersifat dinamis, berimplikasi pada pendidikan yang terus mengalami penyempurnaan dari waktu ke waktu,² karena pendidikan di suatu bangsa dapat dijadikan tolok ukur apakah bangsa tersebut merupakan bangsa yang maju atau bangsa yang tertinggal. Indonesia merupakan bangsa yang pendidikannya dapat dikatakan cukup baik namun masih cukup tertinggal jauh dari negara maju.

Salah satu permasalahan pendidikan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini adalah rendahnya mutu di berbagai lembaga pendidikan, khususnya di lembaga pendidikan Islam seperti Madrasah. Rendahnya kualitas pendidikan³ Islam tersebut meniscayakan adanya berbagai upaya dalam meningkatkan mutu pendidikan oleh semua pihak. Sebenarnya, madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam telah melakukan berbagai upaya dalam

¹ Nila Muhtahidah, "perencanaan Manajemen Berbasis Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan (Studi Kasus di MTs Ihyaul Ulum Dukun Gresik)" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2018), 1.

² Dani Susanto, "perencanaan Manajemen Berbasis Sekolah Terhadap Peningkatan Mutu Pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 4 Slerok Kota Tegal" (Skripsi, Universitas Negeri Semarang, Semarang, 2017), 1.

³ Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa, dan negara. Lihat Undang-Undang Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 1.

meningkatkan mutu pendidikan. Beberapa upaya peningkatan mutu seperti pengembangan kurikulum, peningkatan kompetensi tenaga pendidik melalui pelatihan, peningkatan manajemen pendidikan, dan pengadaan serta perbaikan sarana prasarana pendidikan merupakan langkah maju untuk menjadikan lembaga pendidikan Islam lebih berkualitas. Upaya-upaya tersebut dilandasi suatu kesadaran bahwa betapa pentingnya peranan pendidikan dalam pengembangan sumber daya manusia dan pengembangan watak bangsa.⁴

Permasalahan sekitar rendahnya mutu penyelenggaraan pendidikan di Indonesia selama ini pada dasarnya bermuara pada lemahnya pengelolaan, pengorganisasian dan pengembangan institusi. Sebagaimana diidentifikasi oleh Bank Dunia (1998) sebagaimana yang dikutip oleh Suwandi, bahwa ada empat unsur yang menjadi penghambat potensial terhadap kemajuan pendidikan di Indonesia, yaitu: a) sistem organisasi yang kompleks di tingkat pendidikan (sekolah); b) manajemen yang terlalu sentralistik; c) terpecah-belah dan kakunya proses pembiayaan; dan d) manajemen yang tidak efektif.

Pendidikan merupakan salah satu usaha meningkatkan kualitas hidup manusia melalui pengembangan potensi yang mereka miliki. Pendidikan bukanlah kegiatan yang sederhana, melainkan kegiatan yang dinamis. Mempertimbangkan adanya dinamika penyelenggaraan pendidikan, maka pendidikan memerlukan manajemen yang baik agar tujuan pendidikan tercapai dengan efektif dan efisien.⁵

⁴Ahmad Zaini Aziz, "Manajemen Berbasis Sekolah: Alternatif Peningkatan Mutu Pendidikan Madrasah", *Jurnal El-Tarbawi* (Volume VIII, No.1, 2015), 70.

⁵Badrudin, *Manajemen Peserta Didik* (Jakarta: PT Indeks, 2014), 1.

Konsep dasar pemahaman tentang pendidikan tidak dapat dipisahkan dari manajemen.⁶ Manajemen pada dasarnya merupakan suatu proses penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran atau tujuan tertentu.⁷ Manajemen memiliki ciri khas yang meliputi segala tindakan-tindakan perencanaan, pengarahan, pengorganisasian, dan pengendalian yang bertujuan untuk menentukan dan mencapai sasaran-sasaran yang sudah ditentukan melalui pemanfaatan berbagai sumber, di antaranya sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya.⁸

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan mengamanatkan bahwa setiap satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah wajib memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang meliputi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan pendidikan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan.⁹

Manajemen atau pengelolaan merupakan komponen integral dan tidak dapat dipisahkan dari proses pendidikan secara keseluruhan. Alasannya tanpa manajemen tidak mungkin tujuan pendidikan dapat diwujudkan secara optimal,

⁶Abduk Aziz, *Manajemen Pengelolaan Sarana-Prasarana di Sekolah dan Madrasah* (Surabaya: Pustaka Radja, 2018), 1.

⁷ Muhaimin, et al, *Manajemen Pendidikan: Aplikasinya dalam Penyusunan Rencana Pengembangan Sekolah/Madrasah* (Jakarta: Kencana, 2009), 4.

⁸Mohamad Mustari, *Manajemen Pendidikan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 1.

⁹Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas & Peraturan Pemerintah RI Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Serta Wajib Belajar (Bandung: Citra Umbara, 2016), 63.

efektif, dan efisien. Konsep tersebut berlaku di sekolah yang memerlukan manajemen yang efektif dan efisien.¹⁰ Dalam kerangka inilah tumbuh kesadaran akan pentingnya manajemen berbasis sekolah, yang memberikan otonomi (kewenangan dan tanggung jawab) lebih besar kepada sekolah, memberikan fleksibilitas/keluwesannya lebih besar kepada sekolah untuk mengelola sumber daya sekolah, dan mendorong sekolah meningkatkan partisipasi warga sekolah dan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mutu sekolah dalam kerangka pendidikan nasional.¹¹

Secara resmi, perubahan manajemen ini telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 yang disempurnakan dengan Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Konsekuensi logis dari kedua Undang-Undang tersebut adalah bahwa manajemen pendidikan harus disesuaikan dengan jiwa dan semangat otonomi. Karena itu, manajemen pendidikan berbasis pusat diubah menjadi manajemen berbasis sekolah (MBS).¹²

Manajemen Berbasis Sekolah atau disingkat MBS merupakan istilah yang banyak diungkap dalam dunia pendidikan. Istilah MBS atau *School Based Management* mulai berkembang di Amerika Serikat sebagai dampak dari tuntutan masyarakat terhadap pendidikan yang relevan dengan kehidupan. Dengan kondisi itu, maka setiap sekolah dituntut untuk mengelola sendiri

¹⁰E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, Strategi, dan perencanaan* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), 20.

¹¹E. Mulyasa, *Menjadi Kepala Sekolah Profesional* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), 36.

¹²Hamid, "Manajemen Berbasis Sekolah", *Al-Khawarizmi* (Vol. 1, Maret 2013), 87.

aktivitas satuan pendidikannya dan tidak sepenuhnya bergantung pada pemerintah. Sekolah diberi kewenangan untuk mengelola sendiri kondisi sumber daya yang ada di sekolahnya sehingga dapat menghasilkan *outcome* yang memiliki relevansi bagi kehidupan nyata.¹³

Di Indonesia konsep ini muncul pertama kali pada tahun 2001.¹⁴ Secara resmi konsep ini tertuang dalam dokumen Undang-undang No. 25 tahun 2000 Rencana Strategis Pembangunan Nasional tahun 2000-2004, selanjutnya tertuang dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada Pasal 51 UU Sistem Pendidikan Nasional tercantum bahwa “Pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah.”¹⁵ Di sini jelas bahwa Manajemen Berbasis Sekolah merupakan prinsip dalam pengelolaan satuan pendidikan. Atas dasar itulah, maka prinsip MBS perlu disosialisasikan kepada seluruh sekolah agar dapat dipahami sesuai dengan tujuan penyelenggaraan pendidikan.

MBS memberikan peluang bagi kepala sekolah, guru, dan peserta didik, untuk melakukan inovasi dan improvisasi di sekolah, berkaitan dengan masalah kurikulum, pembelajaran, manajerial, dan lain sebagainya yang tumbuh dari aktivitas, kreativitas, dan profesionalisme yang dimiliki. Pelibatan masyarakat dalam dewan sekolah di bawah monitoring pemerintah, mendorong sekolah

¹³Direktorat Pembinaan SMA Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) Sekolah Menengah Atas* (Jakarta: Direktorat Pembinaan SMA, 2018), 2.

¹⁴ Asbin Pasaribu, “perencanaan Manajemen Berbasis Sekolah dalam Pencapaian Tujuan Pendidikan Nasional Di Madrasah”, *Jurnal EduTech* (Vol. 3 No. 1 Maret 2017), 12.

¹⁵*Undang-undang No. 25 tahun 2000 Rencana Strategis Pembangunan Nasional tahun 2000-2004*. Lihat juga *Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*.

untuk lebih terbuka, demokratis, dan bertanggung jawab. Pemberian kebebasan yang lebih luas memberi kemungkinan kepada sekolah untuk dapat menemukan jati dirinya dalam membina peserta didik, guru, dan petugas lain yang ada di lingkungan sekolah¹⁶ dengan berdasarkan pada prinsip nirlaba, akuntabilitas, penjaminan mutu, transparansi, dan akses berkeadilan.¹⁷

Dalam UU. No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 4 ayat (6) juga mengamanatkan bahwa “pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran sertanya dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan”. Ini dengan jelas mengisyaratkan bahwa keikutsertaan berbagai pihak (masyarakat) yang peduli dengan dunia pendidikan sangat diharapkan dalam memberikan sumbangan baik yang bersifat moril, bahkan jika perlu keikutsertaan mereka dalam bentuk sumbangan materil juga sangat diharapkan, sehingga dari waktu ke waktu mutu pendidikan di Indonesia bisa mengalami peningkatan sehingga tujuan dari pendidikan nasional dapat tercapai dengan efektif dan efisien.

Tujuan pendidikan nasional di Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.¹⁸ Sedangkan Menurut E Mulyasa, Tujuan Pendidikan Nasional secara makro bertujuan membentuk organisasi pendidikan yang bersifat otonom sehingga mampu melakukan inovasi dalam pendidikan untuk menuju suatu

¹⁶E. Mulyasa, *Manajemen...*, 14.

¹⁷*Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan*

¹⁸*Undang-Undang Dasar 1945.*

lembaga yang beretika, selalu menggunakan nalar, berkemampuan komunikasi sosial yang positif dan memiliki sumber daya manusia yang sehat dan tangguh. Sedangkan secara mikro pendidikan nasional bertujuan membentuk manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beretika (beradab dan berwawasan budaya bangsa Indonesia), memiliki nalar (maju, cakap, cerdas, kreatif, inovatif, dan bertanggung jawab), berkemampuan komunikasi sosial (tertib dan sadar hukum, kooperatif dan kompetitif, demokratis), dan berbadan sehat sehingga menjadi manusia mandiri.¹⁹ Tujuan Pendidikan nasional dapat dicapai melalui suatu proses pendidikan bermutu, yang memberikan kesempatan kepada peserta didik dalam mengembangkan potensi dirinya, dan lingkungan belajar yang mendukung. Hal tersebut diciptakan melalui upaya sinergis dari berbagai pihak terkait dan kepentingan dengan penyelenggaraan pendidikan.²⁰

MAN 1 Pamekasan merupakan salah satu sekolah di Pamekasan yang telah menjalin hubungan harmonis dengan berbagai pihak terutama dengan masyarakat sekitar. Hal itu dapat dilihat dari keakraban antara masyarakat sekitar dengan pihak madrasah. Dalam hal ini terdapat peran serta masyarakat dalam membantu mensukseskan segala program kegiatan sekolah dan pembangunan. Misalnya, keikutsertaan masyarakat bergotong royong dalam membangun ruang kelas baru untuk siswa, keikutsertaan orang tua siswa dalam membantu berbagai perayaan yang dilakukan di madrasah. Kemudian sekolah ini telah mampu membuat kurikulum yang unik untuk para siswanya. Seperti

¹⁹ E. Mulyasa, *Kurikulum Berbasis Kompetensi: Konsep, Karakteristik, dan perencanaan*(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), 21.

²⁰ Agus Wibowo, *Manajemen Pendidikan Karakter di Sekolah: Konsep dan Praktik perencanaan*(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 66.

adanya mata pelajaran tambahan yang telah disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat seperti, bimbingan cara cepat baca kitab kuning, bimbingan Tahfidzul Qur'an, dan Khotmil Qur'an.

Berdasarkan fakta dan uraian tersebut, penulis tertarik untuk mengambil lokasi penelitian di MAN 1 Pamekasan, sebab lembaga ini telah menerapkan manajemen berbasis sekolah secara komprehensif. Selain itu, lembaga ini telah banyak menorehkan prestasi di kalangan wilayah Kabupaten Pamekasan. Mengingat keterbatasan peneliti, penelitian dibatasi hanya pada aspek perencanaan dalam bidang manajemen berbasis sekolah. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, peneliti ingin mengetahui bagaimana perencanaan manajemen berbasis sekolah dalam pencapaian tujuan pendidikan nasional dan apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam perencanaan manajemen berbasis sekolah dalam pencapaian tujuan pendidikan nasional. Semua itu menarik untuk diteliti dan diungkapkan lebih lanjut, guna memperoleh gambaran tentang perencanaan manajemen berbasis sekolah dalam peningkatan kualitas pendidikan di MAN 1 Pamekasan.

Dari latar belakang di atas muncul ketertarikan peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah dalam Pencapaian Tujuan Pendidikan Nasional di MAN 1 pamekasan”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian di atas, maka penulis merumuskan fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana perencanaan manajemen berbasis sekolah dalam pencapaian tujuan pendidikan nasional di MAN 1 pamekasan?

2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat perencanaan manajemen berbasis sekolah dalam pencapaian tujuan pendidikan nasional di MAN 1 Pamekasan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana perencanaan manajemen berbasis sekolah dalam pencapaian tujuan pendidikan nasional di MAN 1 pamekasan.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor pendukung dan penghambat perencanaan manajemen berbasis sekolah dalam pencapaian tujuan pendidikan nasional di MAN 1 Pamekasan.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang jelas tentang perencanaan manajemen berbasis sekolah dalam pencapaian tujuan pendidikan nasional, sehingga dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan teori atau proposisi untuk menambah wawasan khasanah keilmuan dalam ilmu manajemen pendidikan Islam.
 - b. Memberikan sumbangan ilmiah bagi kalangan akademis yang mengadakan penelitian berikutnya maupun mengadakan riset baru tentang perencanaan manajemen berbasis sekolah dalam pencapaian tujuan pendidikan nasional.

2. Secara Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi baru bagi kepala madrasah dan semua guru dalam wilayah Kabupaten Pamekasan dalam perencanaan manajemen berbasis sekolah untuk pencapaian tujuan pendidikan nasional di MAN 1 Pamekasan.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi semua pihak terkait dan masyarakat khususnya di wilayah Kabupaten Pamekasan dalam merencanakan manajemen berbasis sekolah dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan nasional.

E. Definisi Istilah

Agar pembaca lebih mudah dalam memahami beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian ini perlu kiranya didefinisikan dan dijelaskan istilah-istilah tersebut agar pembaca memiliki pemahaman sebagaimana yang dimaksud oleh peneliti. Istilah-istilah tersebut adalah:

1. Perencanaan adalah suatu cara yang memuaskan untuk membuat kegiatan dapat berjalan baik, disertai dengan berbagai langkah yang antisipatif guna memperkecil kesenjangan yang terjadi sehingga kegiatan tersebut mencapai tujuan yang telah ditetapkan.²¹
2. Manajemen Berbasis Sekolah adalah proses mengelola sumber daya secara efektif untuk mencapai tujuan yang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah dan mendorong pengambilan keputusan partisipatif secara langsung

²¹Hamzah B. Uno, *Perencanaan Pembelajaran* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011), 2.

semua komponen warga sekolah, yaitu; kepala sekolah, guru, siswa, orang tua dan masyarakat.²²

3. Tujuan Pendidikan Nasional adalah untuk mengembangkan manusia Indonesia dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Manusia yang mempunyai takwa dan iman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mempunyai budi pekerti yang luhur, mandiri, kepribadian yang mantap, kesehatan rohani, dan jasmani, keterampilan dan pengetahuan, dan terakhir mempunyai rasa tanggung jawab untuk berbangsa dan bermasyarakat.²³

F. Kajian Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, posisi peneliti merupakan tindak lanjut dari penelitian sebelumnya. Penelitian yang berfokus pada perencanaan manajemen berbasis sekolah dalam pencapaian tujuan pendidikan nasional sebenarnya bukanlah suatu penelitian yang baru, akan tetapi sudah pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya, sehingga peneliti mencantumkan sebagai salah satu media perbandingan bagi originalitas penelitian. Beberapa penelitian yang mempunyai basis teori yang sama yakni perencanaan manajemen berbasis sekolah dalam pencapaian tujuan pendidikan nasional di antaranya adalah:

Penelitian yang dilakukan oleh Rizqo Adhani Simanjuntak di Tanjung Balai Medan.²⁴ Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan naturalistik. Alat pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu

²²E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, Strategi, dan Implementasi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), 19.

²³*Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang SISDIKNAS & Peraturan Pemerintah Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Serta Wajib Belajar* (Bandung: Citra Umbara, 2016), 6.

²⁴Rizqo Adhani Simanjuntak, "perencanaan Manajemen Berbasis Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di MIS Nurul Anwar Tanjung Balai Medan", Skripsi, Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

teknik wawancara, teknik observasi dan teknik studi dokumen. Adapun subjek dan informan dalam penelitian ini adalah kepala madrasah, kepala TU dan Masyarakat. Data yang didapatkan dilapangan dianalisis dengan cara reduksi data, penyajian data dan yang terakhir kesimpulan. MIS Nurul Anwar Tanjungbalai sudah bermutu melalui adanya penerapan MBS, hal ini dapat dilihat dari berbagai kejuaraan yang diraih oleh peserta didik. Madrasah ini telah berhasil menerapkan sistem MBS melalui berbagai tahap dalam proses implemetasi MBS, yaitu tahap input atau masukan berupa perencanaan visi dan Misi, kemudian tahap proses yaitu pelaksanaan yang dilakukan dengan pengawasan dan evaluasi dan yang terakhir Output hasil berupa peningkatan mutu madrasah. Kepala madrasah berupaya melakukan musyawarah untuk menerima masukan, melakukan pengawasan pada setiap pelaksanaan, melakukan perbaikan terus menerus, membuat kebijakan kebijakan yang dapat meningkatkan mutu madrasah. Adapun faktor pendukung dalam perencanaan MBS ini adalah tingginya tingkat partisipasi masyarakat setempat dan dukungan dari segenap pegawai madrasah dengan *team work* yang baik. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu kurang dana yang menyebabkan minimnya sarana dan prasarana di madrasah ini. Maka dari itu untuk meminimalisir faktor penghambat tersebut adalah mengadakan infaq jum'at ikhlas bagi siswa maupun masyarakat yang mau membantu untuk memenuhi kekurangan dana. Selain itu mengajukan proposal permohonan dana pembangunan di berbagai lembaga.

Penelitian yang dilakukan oleh Dani Susanto di Sekolah Dasar Negeri 4 Slerok Kota Tegal Semarang.²⁵ Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Subjek pada penelitian ini adalah kepala sekolah, ketua komite sekolah, guru, dan orang tua siswa. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan angket, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisa data yang digunakan adalah teknik analisis Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan; (1) Penerapan MBS di Sekolah Dasar Negeri 4 Slerok Kota Tegal sudah berjalan baik. Pelaksanaan MBS di Sekolah Dasar Negeri 4 Slerok Kota Tegal mengacu pada prinsip MBS, yakni kemandirian sekolah, kemitraan sekolah dengan masyarakat, keterbukaan, sekolah, partisipasi stakeholder, dan akuntabilitas sekolah yang dilaksanakan secara bertahap, (2) Melalui perencanaan MBS mutu pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 4 Slerok Kota Tegal meningkat, yang ditandai dari input, proses, dan output pendidikan yang optimal. Berdasarkan hasil penelitian, disarankan bagi sekolah dan masyarakat untuk selalu menjaga hubungan harmonis yang telah terbina agar kerjasama yang terjalin tetap berjalan dengan lancar, sehingga mutu pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 4 Slerok Kota Tegal tetap konsisten.

Penelitian yang dilakukan oleh Nila Mujtahidah di MTs Ihyaul Ulum Dukun Gresik.²⁶ Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Untuk teknik pengumpulan data, peneliti mengumpulkan data melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan untuk mengecek dan memeriksa data

²⁵ Dani Susanto, "perencanaan Manajemen Berbasis Sekolah Terhadap Peningkatan Mutu Pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 4 Slerok Kota Tegal Semarang", Skripsi, Semarang: Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang.

²⁶ Nila Mujtahidah, "perencanaan Manajemen Pendidikan dalam Peningkatan Mutu Pendidikan", Skripsi, Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang ada peneliti menggunakan teknik triangulasi data. Adapun teknik analisis data dalam penelitian kualitatif di mulai sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Adapun hasil penelitian di MTs Ihyaul Ulum Dukun Gresik yang peneliti temukan adalah: (1) perencanaan MBS yang dilaksanakan dalam 5 tahap, di mulai dengan analisis SWOT, pembuatan RKM, pelaksanaan RKM, evaluasi dan tindak lanjut. (2) perencanaan MBS diterapkan pada 7 komponen manajemen sekolah dalam rangka peningkatan mutu pendidikan yang peningkatan mutunya dilihat pada 3 standar nasional pendidikan yaitu, standar isi, standar proses, dan standar pendidik dan tenaga kependidikan. (3) hasil perencanaan manajemen berbasis sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan di MTs Ihyaul Ulum Dukun Gresik yang dilihat pada standar nasional pendidikan dapat dikatakan sudah cukup berhasil, ke tiga standar di atas dapat terlaksana lebih baik dan lebih optimal berkat diterapkannya MBS, hal tersebut menghasilkan peningkatan prestasi baik dari peserta didik, guru, dan juga sekolah serta tujuan pendidikan sekolah. Dapat dicapai.

Tabel 1.1

Perbedaan dan persamaan antara Penelitian Terdahulu dengan Penelitian ini

Peneliti dan Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan	Persamaan
Rizqo Adhani Simanjuntak. 2019. perencanaan Manajemen Berbasis Sekolah dalam Meningkatkan	MIS Nurul Anwar Tanjungbalai sudah bermutu melalui adanya penerapan MBS, hal ini dapat dilihat dari berbagai kejuaraan yang diraih oleh peserta didik. Madrasah ini telah berhasil menerapkan sistem MBS melalui berbagai tahap dalam proses	1. Lokasi Penelitian ini dilakukan di MIS. Sedangkan yang dilakukan oleh peneliti,	1. Penelitian ini sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif 2. Metode pengumpulan

<p>Mutu Pendidikan di MIS Nurul Anwar Tanjung Balai Medan</p>	<p>implemetasi MBS, yaitu tahap input atau masukan berupa perencanaan visi dan Misi, kemudian tahap proses yaitu pelaksanaan yang dilakukan dengan pengawasan dan evaluasi dan yang terakhir Output hasil berupa peningkatan mutu madrasah. Kepala madrasah berupaya melakukan musyawarah untuk menerima masukan, melakukan pengawasan pada setiap pelaksanaan, melakukan perbaikan terus menerus, membuat kebijakan kebijakan yang dapat meningkatkan mutu madrasah. Adapun faktor pendukung dalam perencanaan MBS ini adalah tingginya tingkat partisipasi masyarakat setempat dan dukungan dari segenap pegawai madrasah dengan <i>team work</i> yang baik. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu kurang dana yang menyebabkan minimnya sarana dan prasarana di madrasah ini. Maka dari itu untuk meminimalisir faktor penghambat tersebut adalah mengadakan infaq jum'at ikhlas bagi siswa maupun masyarakat yang mau membantu untuk memenuhi kekurangan dana. Selain itu mengajukan proposal permohonan dana pembangunan di berbagai lembaga</p>	<p>lokasi penelitiannya di MAN 2. Penelitian ini membahas mulai dari perencanaan dan bagaimana perencanaan Manajemen Berbasis Sekolah. Sedangkan yang dibahas dalam penelitian penulis hanya dalam perencanaan MBS dalam peningkatan mutu pendidikan</p>	<p>datanya sama-sama menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi 3. Penelitian ini sama-sama membahas tentang bagaimana perencanaan manajemen berbasis sekolah dan faktor pendukung dan faktor penghambat dalam penerapan manajemen berbasisi sekolah</p>
<p>Dani Susanto. 2017. perencanaan Manajemen Berbasis Sekolah Terhadap Peningkatan Mutu Pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 4 Slerok</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan; (1) Penerapan MBS di Sekolah Dasar Negeri 4 Slerok Kota Tegal sudah berjalan baik. Pelaksanaan MBS di Sekolah Dasar Negeri 4 Slerok Kota Tegal mengacu pada prinsip MBS, yakni kemandirian sekolah, kemitraan sekolah dengan masyarakat, keterbukaan, sekolah, partisipasi stakeholder, dan akuntabilitas sekolah yang dilaksanakan secara bertahap, (2)</p>	<p>1. Lokasi Penelitian ini dilakukan di Sekolah Dasar Negeri. Sedangkan yang dilakukan oleh peneliti, lokasi penelitiannya</p>	<p>1. Penelitian ini sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif 2. Metode pengumpulan datanya sama-sama menggunakan metode</p>

Kota Tegal Semarang	Melalui perencanaan MBS mutu pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 4 Slerok Kota Tegal meningkat, yang ditandai dari input, proses, dan output pendidikan yang optimal. Berdasarkan hasil penelitian, disarankan bagi sekolah dan masyarakat untuk selalu menjaga hubungan harmonis yang telah terbina agar kerjasama yang terjalin tetap berjalan dengan lancar, sehingga mutu pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 4 Slerok Kota Tegal tetap konsisten.	di MAN 2. Penelitian ini membahas mulai dari perencanaan dan bagaimana perencanaan Manajemen Berbasis Sekolah. Sedangkan yang dibahas dalam penelitian penulis hanya dalam perencanaan MBS dalam peningkatan mutu pendidikan	wawancara, observasi, dan dokumentas 3. Penelitian ini sama-sama membahas tentang bagaimana perencanaan manajemen berbasis sekolah
Nila Mujtahidah. 2018. perencanaan Manajemen Pendidikan dalam Peningkatan Mutu Pendidikan”, Skripsi, Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	Hasil penelitian di MTs Ihyaul Ulum Dukun Gresik yang peneliti temukan adalah: (1) perencanaan MBS yang dilaksanakan dalam 5 tahap, di mulai dengan analisis SWOT, pembuatan RKM, pelaksanaan RKM, evaluasi dan tindak lanjut. (2) perencanaan MBS diterapkan pada 7 komponen manajemen sekolah dalam rangka peningkatan mutu pendidikan yang peningkatan mutunya dilihat pada 3 standar nasional pendidikan yaitu, standar isi, standar proses, dan standar pendidik dan tenaga kependidikan. (3) hasil perencanaan manajemen berbasis sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan di MTs Ihyaul Ulum Dukun Gresik yang dilihat pada standar nasional pendidikan dapat dikatakan sudah cukup berhasil, ke tiga standar di atas dapat terlaksana lebih baik dan lebih	1. Lokasi Penelitian ini dilakukan di MTs. Sedangkan yang dilakukan oleh peneliti, lokasi penelitiannya di MAN 2. Penelitian ini membahas mulai dari perencanaan dan bagaimana perencanaan Manajemen Berbasis Sekolah. Sedangkan yang dibahas dalam	1. Penelitian ini sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif 2. Metode pengumpulan datanya sama-sama menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentas 3. Penelitian ini sama-sama membahas tentang bagaimana perencanaan manajemen berbasis

	optimal berkat diterapkannya MBS, hal tersebut menghasilkan peningkatan prestasi baik dari peserta didik, guru, dan juga sekolah serta tujuan pendidikan sekolah. Dapat dicapai.	penelitian penulis hanya dalam perencanaan MBS dalam peningkatan mutu pendidikan	sekolah
--	--	--	---------

Berdasarkan tinjauan pustaka di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa meskipun penelitian yang penulis lakukan ini bukan penelitian yang pertama dan merupakan penelitian lanjutan dari penelitian-penelitian sebelumnya, tetapi dalam penelitian ini terdapat perbedaan dengan penelitian-penelitian yang telah ada. Letak perbedaannya, yaitu peneliti ingin memfokuskan pada bagaimana perencanaan manajemen berbasis sekolah dalam pencapaian tujuan pendidikan nasional dan faktor-faktor apa saja yang menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat dalam perencanaan manajemen berbasis sekolah dalam pencapaian tujuan pendidikan nasional di MAN 1 Pamekasan.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Manajemen Berbasis Sekolah

1. Pengertian Manajemen

Secara etimologi, kata *manajemen* berasal dari bahasa Perancis kuno “*management*” yang memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur. Dalam bahasa Inggris, kata *manajemen* berasal dari kata *to manage* artinya mengelola, membimbing, dan mengawasi. Sementara itu, dalam bahasa Latin, kata *manajemen* berasal dari kata *manus* yang berarti “tangan” dan *agere* yang berarti melakukan, jika digabung memiliki arti menangani.¹ Jika diambil dari bahasa Italia, *manajemen* berasal dari kata *magiare* yang artinya melatih kuda dalam melangkahakan kakinya. Dalam pengertian manajemen tersebut terkandung dua kegiatan, yaitu kegiatan berpikir (*mind*) dan kegiatan tingkah laku (*action*).²

Secara terminologi, kata *manajemen* tidak memiliki keseragaman di antara para ahli. Berikut ini beberapa pendapat para ahli mengenai definisi manajemen.

- a. Menurut Kathryn M. Bartol dan David C. Martin sebagaimana yang dikutip oleh Wahyudin, manajemen adalah proses untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan melakukan kegiatan dari empat fungsi utama, yaitu merencanakan (*planning*), mengorganisasi (*organizing*),

¹Abdul Aziz, *Pengantar Manajemen dan Substansi Administrasi Pendidikan* (Surabaya: Pustaka Radja, 2017), 13

²Novan Ardy Wiyani, *Manajemen Kelas: Teori dan Aplikasi untuk Menciptakan Kelas yang Kondusif* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 49.

memimpin (*leading*), dan mengendalikan (*controlling*). Dengan demikian manajemen adalah sebuah kegiatan yang berkesinambungan.³

- b. Menurut Rohiat, manajemen adalah melakukan pengelolaan sumberdaya yang dimiliki oleh sekolah atau organisasi yang di antaranya adalah manusia, uang, metode, material, mesin dan pemasaran yang dilakukan dengan sistematis dalam suatu proses.⁴
- c. Menurut Manullang, manajemen adalah seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan daripada sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan terlebih dahulu.⁵
- d. Menurut James A. F. Stoner sebagaimana yang dikutip Handoko, manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya-sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.⁶

Berdasarkan beberapa definisi di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa manajemen adalah seni dan ilmu merencanakan, mengorganisasi, mengarahkan, mengkoordinasikan serta mengawasi tenaga manusia dengan bantuan alat-alat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2. Pengertian Manajemen Berbasis Sekolah

³Dinn Wahyudin, *Manajemen Kurikulum* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), 176.

⁴Rohiat, *Manajemen Sekolah* (Bandung: Refika Aditama, 2010),

⁵Manullang, *Dasar-Dasar Manajemen* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), 17.

⁶Tani Handoko, *Manajemen Edisi 2* (Yogyakarta: BPFE-Yohyakarta, 2001), 8.

Istilah manajemen berbasis sekolah (MBS) merupakan terjemahan dari *School Based Management*. Istilah ini pertama kali muncul di Amerika Serikat ketika masyarakat mulai mempertanyakan relevansi pendidikan dengan tuntutan dan perkembangan masyarakat.⁷ Munculnya gagasan ini dipicu oleh ketidakpuasan atau kegerahan para pengelola pendidikan pada level operasional atas keterbatasan kewenangan yang mereka miliki untuk dapat mengelola sekolah secara mandiri.

Selanjutnya Daman sebagaimana yang dikutip oleh Suwandi menjelaskan bahwa di Indonesia, gagasan penerapan pendekatan ini muncul belakangan sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah sebagai paradigma baru dalam pengoperasian sekolah. Selama ini, sekolah hanyalah kepanjangan tangan birokrasi pemerintah pusat untuk menyelenggarakan urusan politik pendidikan. Para pengelola sekolah sama sekali tidak memiliki banyak kelonggaran untuk mengoperasikan sekolahnya secara mandiri. Semua kebijakan tentang penyelenggaraan pendidikan di sekolah umumnya diadakan di tingkat pemerintah pusat atau sebagian di instansi vertikal dan sekolah hanya menerima apa adanya.⁸

Manajemen berbasis sekolah atau dalam terminologi bahasa Inggris lazim disebut "*school based management*" dipahami sebagai salah satu alternatif pilihan formal untuk mengelola penyelenggaraan pendidikan yang terdesentralisasi dengan menempatkan sekolah sebagai unit utama peningkatan kualitas pendidikan. Manajemen Berbasis Sekolah ditawarkan

⁷Nurokhim, "perencanaan Manajemen Berbasis Sekolah di Madrasah", *Jurnal Kependidikan* (Vol. 5 No. 2 November, 2017), 251.

⁸Suwandi, "Kajian Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah Pada Pendidikan Menengah" *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan* (Vol. 17, Nomor 4, Juli 2017), 421.

sebagai salah satu alternatif jawaban pemberian otonomi daerah di bidang pendidikan, mengingat prinsip dan kecenderungannya yang mengembalikan pengelolaan manajemen sekolah kepada pihak-pihak yang dianggap paling mengetahui kebutuhan riil di sekolah. Desentralisasi persekolahan adalah sebuah proses yang kompleks dan dapat membawa perubahan-perubahan penting tentang cara sistem persekolahan untuk menciptakan kebijakan, mendapatkan sumber daya, mengeluarkan dana, melatih guru, menyusun kurikulum, dan mengelola sekolah-sekolah setempat. Terkait desentralisasi, manajemen berbasis sekolah dikembangkan untuk membangun sekolah yang berkualitas. Konsep desentralisasi model MBS mengacu kepada sekolah swa-manajemen (*self-managing school*), bukan pada penyelenggaraan sekolah mandiri (*self-governing school*). sedangkan Depdiknas merumuskan pengertian MBS sebagai model manajemen yang memberikan otonomi yang lebih besar kepada sekolah dan mendorong pengambilan keputusan partisipatif yang melibatkan secara langsung warga sekolah (guru, siswa, kepala sekolah, karyawan, orangtua, dan masyarakat) untuk meningkatkan mutu sekolah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional.⁹

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) merupakan suatu konsep pengelolaan yang menawarkan otonomi kepada sekolah untuk mengambil keputusan dalam upaya melibatkan seluruh komponen sekolah secara efektif dan efisien untuk meningkatkan mutu pendidikan.¹⁰ Menurut Lubis, Manajemen Berbasis Sekolah adalah pengkoordinasian dan penyerasian

⁹Wahyudi, "perencanaan Manajemen Berbasis Sekolah (*school-Based Mngement*) dalam rangka desentralisasi Pendidikan" (IP, FKIP, Universitas Tanjung Pura, Pontianak), 2.

¹⁰Sunanto, "perencanaan Manajemen Berbasis Sekolah dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Pada SMP Negeri 19 Percontohan Banda Aceh" *INTELEKTUALITA* (Volume 3, Nomor 1, Januari-Juni 2015), 51.

sumberdaya yang dilakukan secara otonomis (mandiri) oleh sekolah melalui sejumlah input manajemen untuk mencapai tujuan sekolah dalam kerangka pendidikan nasional, dengan melibatkan semua kelompok kepentingan yang terkait dengan sekolah secara langsung dalam pengambilan keputusan, atau secara ringkas dapat dikatakan bahwa MBS adalah otonomi manajemen sekolah dalam pengambilan keputusan partisipatif.¹¹

Secara konseptual Manajemen Berbasis Sekolah dapat diartikan sebagai sebuah model pengelolaan yang memberikan kewenangan lebih besar kepada sekolah sehingga sekolah dan masyarakat terlibat aktif dalam penyelenggaraan pendidikan.¹² Sedangkan Menurut Nanang Fattah, Manajemen Berbasis Sekolah adalah suatu pendekatan praktis yang bertujuan untuk mendesain pengelolaan sekolah dengan memberikan kekuasaan kepada sekolah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya kinerja sekolah yang mencakup guru, pegawai, kepala sekolah, orangtua siswa dan masyarakat yang berkepentingan.¹³

Berdasarkan beberapa definisi di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) adalah model manajemen yang memberikan otonomi dan fleksibilitas yang lebih luas kepada sekolah untuk mengelola sumber daya yang ada dan mendorong peningkatan partisipasi warga sekolah dan masyarakat guna mencapai tujuan sekolah.

¹¹Umul Aiman Lubis, “perencanaan Manajemen Berbasis Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Lulusan di SMA Islam Al-Ulum Terpadu Medan” *Analytica Islamica* (Vol. 4, No. 1, 2015), 170.

¹²Nurokhim, “perencanaan Manajemen berbasis Sekolah di Madrasah” *Jurnal Kependidikan* (Vol. 5 No. 2 November 2017), 251.

¹³Nanang Fattah, *Konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dan Dewan Sekolah* (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), 16.

Pada intinya MBS merupakan salah satu wujud dari reformasi pendidikan yang menawarkan kepada sekolah untuk menyediakan pendidikan yang lebih baik dan memadai bagi para peserta didik. Otonomi dalam manajemen merupakan potensi bagi sekolah untuk meningkatkan kinerja para staf dan menawarkan partisipasi langsung kepada masyarakat terhadap pendidikan. Kewenangan yang bertumpu pada sekolah merupakan inti dari MBS yang dipandang memiliki tingkat efektivitas tinggi serta memberikan beberapa keuntungan sebagai berikut:

- a. Kebijaksanaan dan kewenangan sekolah membawa pengaruh langsung kepada peserta didik, orang tua, dan guru;
- b. Bertujuan bagaimana memanfaatkan sumber daya lokal;
- c. Efektif dalam melakukan pembinaan peserta didik seperti kehadiran, hasil belajar, tingkat pengulangan, tingkat putus sekolah, moral guru, dan iklim sekolah;
- d. Adanya perhatian bersama untuk mengambil keputusan, memberdayakan guru, manajemen sekolah, rancang ulang sekolah, dan perubahan perencanaan.

Dalam pelaksanaannya di Indonesia, perlu ditekankan bahwa kita tidak harus meniru secara persis model-model MBS dari negara lain. Sebaliknya Indonesia akan belajar banyak dari pengalaman-pengalaman pelaksanaan MBS di negara lain, kemudian memodifikasi berbagai kondisi setempat seperti sejarah, geografi, struktur masyarakat, dan pengalaman-pengalaman pribadi di bidang pengelolaan pendidikan yang telah dan sedang berlangsung selama ini.

3. Tujuan Manajemen Berbasis Sekolah

Manajemen berbasis sekolah merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai keunggulan masyarakat bangsa dalam penguasaan ilmu dan teknologi, yang dinyatakan dalam GBHN. Hal tersebut diharapkan dapat dijadikan landasan dalam pengembangan pendidikan di Indonesia yang berkualitas dan berkelanjutan, baik secara makro, meso, maupun mikro.

Manajemen berbasis sekolah yang ditandai dengan otonomi sekolah dan pelibatan masyarakat merupakan respons pemerintah terhadap gejala-gejala yang muncul di masyarakat, bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, mutu, dan pemerataan pendidikan. Peningkatan efisiensi antara lain, diperoleh melalui keleluasaan mengelola sumber daya partisipasi masyarakat dan penyederhanaan birokrasi. Sementara peningkatan mutu dapat diperoleh antara lain melalui partisipasi orang tua terhadap sekolah, fleksibilitas pengelolaan sekolah dan kelas, peningkatan profesionalisme guru dan kepala sekolah, berlakunya sistem insentif serta disensitif. Peningkatan pemerataan antara lain diperoleh melalui peningkatan partisipasi masyarakat yang memungkinkan pemerintah lebih berkonsentrasi pada kelompok tertentu. Hal ini dimungkinkan karena pada sebagian masyarakat tumbuh rasa kepemilikan yang tinggi terhadap sekolah.

Tujuan utama MBS adalah untuk meningkatkan efisiensi, mutu dan pemerataan pendidikan. Peningkatan efisiensi diperoleh melalui keleluasaan mengelola sumber daya yang ada, partisipasi masyarakat dan penyederhanaan birokrasi. Peningkatan mutu diperoleh melalui partisipasi orang tua, kelenturan pengelolaan sekolah, peningkatan profesionalisme guru, adanya

hadiah dan hukuman sebagai kontrol, serta hal lain yang dapat menumbuhkan kembangkan suasana yang kondusif.¹⁴

Sedangkan menurut Sagala menjelaskan bahwa tujuan diterapkannya MBS adalah untuk: (a) meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan penugasan staf, (b) meningkatnya profesionalisme guru dan tenaga kependidikan di sekolah, (c) munculnya gagasan baru dalam perencanaan kurikulum, penggunaan teknologi pembelajaran dan pemanfaatan sumber-sumber belajar, dan (d) meningkatnya mutu partisipasi masyarakat dan stakeholder. Oleh karena itu, MBS perlu diterapkan oleh setiap sekolah, karena sekolah lebih memahami hubungan-hubungan yang terdapat di lingkungan sekolah.¹⁵

Menurut Nanang Fatah bahwa tujuan penerapan MBS memberikan keleluasaan kepada pihak pengelola pendidikan yang seharusnya dilakukan di sekolah masing-masing bahkan dalam mengambil keputusan pengelola pendidikan tidak harus menunggu dari pemerintah. MBS mengubah sistem pengambilan keputusan dengan memindahkan otoritas dalam pengambilan keputusan dan manajemen kepada setiap yang berkepentingan ditingkat lokal.

Secara terperinci MBS ini memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif sekolah, atau peran sekolah dalam mengelola dan memberdayakan sumber daya yang tersedia.

¹⁴ Siti Aminah dkk, "perencanaan Manajemen Berbasis Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Pada MTsN Kota Lhokseumawe" *Jurnal Administrasi Pendidikan* (Volume 3, No. 2, Mei 2015), 3.

¹⁵ Syaiful Sagala, *Manajemen Strategik dalam Peningkatan Mutu Pendidikan: Pembuka Ruang Kreativitas, Inovasi, dan Pemberdayaan Potensi Sekolah dalam Sistem Otonomi Sekolah* (Bandung: Alfabeta, 2011), 157.

- b. Meningkatkan kepedulian warga sekolah, atau antara sekolah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan melalui pengambilan keputusan bersama;
- c. Meningkatkan tanggungjawab sekolah, atau antara sekolah kepada orangtua, juga pemerintah tentang mutu sekolah, atau sekolah dalam meningkatkan kompetensi yang sehat antara sekolah dengan sekolah lain untuk pencapaian mutu pendidikan yang diharapkan.

Dari uraian di atas dapatlah dipahami bahwa tujuan MBS antara lain sekolah akan lebih berinisiatif atau kreatif dalam mengadakan dan memanfaatkan sumber daya sekolah, sekolah akan mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman, sekolah akan bertanggung jawab terhadap mutu pendidikan kepada pemerintah, orang tua peserta didik, dan masyarakat, dan sekolah dapat melakukan persaingan yang sehat dengan sekolah lainnya untuk meningkatkan mutu pendidikan. Sekolah yang ingin sukses dalam pelaksanaan program MBS, harus memahami karakteristik MBS secara profesional dan bersifat komprehensif. Dalam menguraikan karakteristik MBS, pendekatan sistem yaitu input, proses, dan output digunakan untuk memandunya.

4. Prinsip-Prinsip Manajemen Berbasis Sekolah

Menurut Hidayat sebagaimana yang dikutip oleh Aziz mengatakan bahwa terdapat empat prinsip manajemen berbasis sekolah sebagai bentuk perencanaan otonomi daerah bidang pendidikan yang menjadi landasan dalam menerjemahkan konsep manajemen peningkatan mutu berbasis

sekolah sesuai dengan tujuannya, yaitu otonomi, fleksibilitas, partisipasi, dan inisiatif.

a. Prinsip otonomi

Prinsip otonomi diartikan sebagai kemandirian, yaitu kemandirian dalam mengatur dan mengurus diri sendiri. Kemandirian dalam program dan pendanaan merupakan tolok ukur utama kemandirian sekolah. Kemandirin yang berlangsung secara terus menerus akan menjamin keberlangsungan hidup dan perkembangan sekolah.

b. Prinsip fleksibelitas

Prinsip fleksibelitas dapat diartikan sebagai keluwesan uang diberikan kepada sekolah untuk mengelola, memanfaatkan, dan memberdayakan sumber daya sekolah seoptimal mungkin untuk meningkatkan mutu sekolah. Prinsip ini akan melahirkan sekolah yang lebih lincah dalam bergerak dan tanggap terhadap permasalahan yang harus dihadapi.

c. Prinsip partisipasi

Prinsip partisipasi dapat diartikan dengan penciptaan lingkungan yang terbuka dan demokratis. Warga sekolah (guru, siswa, karyawan) dan masyarakat didorong untuk terlibat langsung dalam penyelenggaraan pendidikan, mulai dari pengambilan keputusan, pelaksanaan, dan evaluasi untuk meningkatkan mutu pendidikan. Hal ini dilandasi dengan keyakinan bahwa jika seorang dilibatkan maka yang bersangkutan akan mempunyai “rasa memiliki” terhadap sekolah, sehingga yang bersangkutan juga akan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan ke arah yang lebih bermutu.

d. Prinsip inisiatif

Prinsip ini didasari atas konsepsi bahwa manusia bukanlah sumber daya yang statis, melainkan dinamis. Oleh karena itu, potensi sumber daya manusia harus selalu digali, ditemukan, dan dikembangkan untuk menjadi sumber daya yang inisiatif dalam pengelolaan pendidikan.¹⁶

5. Manfaat Manajemen Berbasis Sekolah

Penerapan manajemen berbasis sekolah banyak memberikan manfaat. Hal ini dikarenakan MBS memberikan kebebasan dan keleluasaan yang besar pada sekolah, disertai seperangkat tanggungjawab. Dengan adanya otonomi yang memberikan keleluasaan tersebut maka sekolah dapat lebih meningkatkan kesejahteraan guru sehingga dapat lebih berkonsentrasi pada tugas. Selain itu, penerapan MBS juga dapat mendorong profesioanlisme guru dan kepala sekolah sebagai pemimpin sekolah, hal ini dikarenakan konsep MBS menghendaki kebebasan kepada guru dan kepala sekolah dalam menyusun kurikulum dan program sekolah. Adanya kesempatan untuk menyusun kurikulum dan program kepada guru dan kepala sekolah tentunya kurikulum yang terbentuk akan sesuai dengan kebutuhan masyarakat (tepat sasaran). Dengan demikian rasa tanggap sekolah kepada kebutuhan masyarakat meningkat dan menjamin layanan pendidikan sesuai dengan tuntutan peserta didik dan masyarakat.

MBS menekankan keterlibatan maksimal berbagai pihak, seperti pada sekolah-sekolah swasta, sehingga menjamin partisipasi staf, orang tua, peserta didik, dan masyarakat yang lebih luas dalam perumusan-perumusan

¹⁶Ahmad Zaini Aziz, "Alternatif Peningkatan Mutu Pendidikan Madrasah" *el-Tarbawi Jurnal Pendidikan Islam* (Volume VIII, No.1, 2015), 80.

keputusan tentang pendidikan. Kesempatan partisipasi tersebut dapat meningkatkan komitmen mereka terhadap sekolah. Selanjutnya, aspek-aspek tersebut pada akhirnya akan mendukung efektivitas dalam pencapaian tujuan sekolah. Adanya kontrol dari masyarakat dan monitoring dari pemerintah, pengelola sekolah menjadi akuntabel, transparan, egaliter, dan demokratis, serta menghapuskan monopoli dalam pengelolaan pendidikan.¹⁷

6. Karakteristik Manajemen Berbasis Sekolah

Karakteristik manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah dapat diketahui dengan bagaimana sekolah dapat mengoptimalkan kinerjanya. Beberapa kinerja yang dapat menjadi acuan adalah, proses pembelajaran, pengelolaan sumber belajar, profesionalisme tenaga kependidikan, serta sistem administrasi secara keseluruhan.

Dalam menguraikan karakteristik MBS, pendekatan sistem seperti input, proses, dan output harus digunakan untuk memandunya, karena sekolah merupakan sebuah sistem, sehingga penguraian karakteristik MBS berdasarkan pada input, proses, dan output.

Uraian berikut ini dimulai dari output dan diakhiri dengan input, mengingat output memiliki tingkat kepentingan tertinggi, sedangkan proses memiliki tingkat kepentingan satu tingkat lebih rendah dari output, dan input memiliki tingkat kepentingan dua tingkat lebih rendah dari output. Output adalah prestasi sekolah yang dihasilkan oleh proses pembelajaran dan manajemen di sekolah. Ada dua bentuk output yang ingin dihasilkan oleh sekolah, yaitu output berupa prestasi akademik dan output berupa prestasi

¹⁷E. Mulyasa, *Manajemen...*, 26.

non akademik. Output prestasi akademik misalnya nilai Ujian Akhir Nasional (UAN), nilai pelajaran Matematika, IPA, dan lain-lain.¹⁸

Menurut Mulyasa mengatakan bahwakarakteristik manajemen berbasis sekolah bisa diketahui antara lain dari bagaimana sekolah dapat mengoptimalkan kinerja organisasi sekolah, proses belajar mengajar, pengelolaan sumber daya manusia, dan pengelolaan sumber daya dan administrasi. Adapun dalam dimensi proses, Mulyasamenyebutkan bahwa sekolah efektif dalam kerangka MBS pada prinsipnya memiliki sejumlah karakteristik proses yaitu: (a) Efektivitas proses belajar mengajar yang tinggi, (b) kepemimpinan sekolah yang kuat, (c) lingkungan sekolah yang aman dan tertib, (d) pengelolaan tenaga kependidikan yang efektif, (e) budaya mutu yang melakukan perbaikan, pemberian sanksi dan ganjaran, (f) memiliki *team work* yang kompak, cerdas, dan dinamis, (g) memiliki kewenangan dan kemandirian, (h) partisipasi yang tinggi dari warga sekolah dan masyarakat, (i) memiliki keterbukaan (transparansi) manajemen, (j) memiliki kemauan untuk berubah baik fisik maupun psikologis, (k) melakukan evaluasi dan perbaikan secara berkelanjutan, (l) responsif dan antisipatif terhadap kebutuhan, (m) memiliki komunikasi yang baik, (n) memiliki akuntabilitas, dan (o) kemampuan menjaga suistinabilitas.¹⁹

Sedangkan menurut Nurkolis sebagaimana yang dikutip oleh Dolong menguraikan bahwa ada delapan karakteristik Manajemen Berbasis Sekolah di antaranya sebagai berikut:

¹⁸Ihsan dkk, "Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di SD Negeri 62 Kota Banda Aceh" *Jurnal Administrasi Pendidikan* (Volume 4, No. 2, November 2014), 14.

¹⁹E. Mulyasa, *Manajemen...*, 29-30

- a. Sekolah dengan MBS memiliki misi atau cita-cita menjalankan sekolah untuk mewakili sekelompok harapan bersama, keyakinan dan nilai-nilai sekolah, membimbing warga sekolah di dalam aktivitas pendidikan dan memberi arah kerja. Misi ini mempunyai pengaruh yang besar terhadap fungsi dan efektivitas sekolah, karena dengan misi ini warga sekolah dapat mengembangkan budaya organisasi sekolah yang tepat, membangun komitmen yang tinggi terhadap sekolah, dan mempunyai inisiatif untuk memberikan tingkat layanan pendidikan yang lebih baik.
- b. Aktivitas pendidikan dijalankan berdasarkan karakteristik kebutuhan dan situasi sekolah. Hakikat aktivitas sangat penting bagi sekolah untuk meningkatkan kualitas pendidikan, karena secara tidak langsung memperkenalkan perubahan manajemen sekolah dari manajemen kontrol eksternal menjadi model berbasis sekolah.
- c. Terjadinya proses perubahan strategi manajemen yang menyangkut hakikat manusia, organisasi sekolah, gaya pengambilan keputusan, gaya kepemimpinan, penggunaan kekuasaan, dan keterampilan-keterampilan manajemen. Oleh karena itu dalam konteks pelaksanaan MBS, perubahan strategi manajemen lebih memandang pada aspek pengembangan yang tepat dan relevan dengan kebutuhan sekolah.
- d. Keleluasaan dan keweangan dalam pengelolaan sumber daya yang efektif untuk mencapai tujuan pendidikan, guna memecahkan masalah-masalah pendidikan yang dihadapi, baik tenaga kependidikan, keuangan dan sebagainya.

- e. MBS menuntut peran aktif sekolah, administrator sekolah, guru, orang tua, dan pihak-pihak yang terkait dengan pendidikan di sekolah. Dengan MBS sekolah dapat mengembangkan siswa dan guru sesuai dengan karakteristik sekolah masing-masing. Dalam konteks ini, sekolah berperan mengembangkan inisiatif, memecahkan masalah, dan mengeksplorasi semua kemungkinan untuk memfasilitasi efektivitas pembelajaran. Demikian halnya dengan unsur-unsur lain seperti guru, orang tua, komite sekolah, administrator sekolah, dinas pendidikan, dan sebagainya sesuai dengan perannya masing-masing.
- f. MBS menekankan hubungan antar manusia yang cenderung terbuka, bekerja sama, semangat tim, dan komitmen yang saling menguntungkan. Oleh karena itu, iklim organisasi cenderung mengarah ke tipe komitmen sehingga efektivitas sekolah dapat tercapai.
- g. Peran administrator sangat penting dalam kerangka MBS, termasuk di dalamnya kualitas yang dimiliki administrator.
- h. Dalam MBS, efektivitas sekolah dinilai menurut indikator multi tingkat dan multi segi. Penilaian tentang efektivitas sekolah harus mencakup proses pembelajaran dan metode untuk membantu kemajuan sekolah. Oleh karena itu, penilaian efektivitas sekolah harus memperhatikan multi tingkat, yaitu pada tingkat sekolah, kelompok,

dan individu, serta indikator multi segi yaitu input, proses dan output sekolah serta perkembangan akademik siswa.²⁰

7. Strategi perencanaan Berbasis Sekolah

Hakikatnya, mengubah pendekatan manajemen berbasis pusat menjadi MBS bukanlah pekerjaan mudah, tetapi merupakan suatu proses yang terus-menerus dan melibatkan seluruh elemen yang bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah.²¹ Konsep MBS merupakan kebijakan baru yang sejalan dengan paradigma desentralisasi dalam pemerintahan. Strategi ini diharapkan agar penerapan MBS dapat benar-benar meningkatkan mutu pendidikan. Strategi dalam menerapkan MBS di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan kapasitas dan komitmen seluruh warga sekolah, termasuk masyarakat dan orang tua siswa. Upaya untuk memperkuat peran kepala sekolah harus menjadi kebijakan yang mengiringi penerapan kebijakan MBS.
- b. Membangun budaya sekolah (*school culture*) yang demokratis, transparan dan akuntabel. Termasuk membiasakan sekolah untuk membuat laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Model memajangkan RAPBS di papan pengumuman sekolah yang dilakukan oleh *Managing Basic Education* (MBE) merupakan tahap awal yang sangat positif. Juga membuat laporan secara *insidental* berupa *booklet*, *leaflet*, atau poster tentang rencana kegiatan sekolah. Alangkah

²⁰ M. Jufri Dolong, "Karakteristik Manajemen Pendidikan Berbasis Sekolah" Email: jufri.dolong@yahoo.co.id (Volume VII, Nomor 1, Januari - Juni 2018), 3.

²¹Hamid, "Manajemen Berbasis Sekolah" *Al-Khwarizmi* (Vol.I, Maret 2013), 93.

serasinya jika kepala sekolah dan ketua Komite Sekolah dapat tampil bersama dalam media tersebut.

- c. Pemerintah pusat lebih memainkan peran monitoring dan evaluasi. Dengan kata lain, pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu melakukan kegiatan bersama dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan MBS di sekolah, termasuk pelaksanaan *block grant* yang diterima sekolah.
- d. Mengembangkan model program pemberdayaan sekolah. Bukan hanya sekedar melakukan pelatihan MBS, yang lebih banyak dipenuhi dengan pemberian informasi kepada sekolah. Model pemberdayaan sekolah berupa pendampingan atau fasilitasi dinilai lebih memberikan hasil yang lebih nyata dibandingkan dengan pola-pola lama berupa penataran MBS.²²

8. perencanaan Manajemen Berbasis Sekolah di Indonesia

Indikator manajemen berbasis sekolah terlaksana dengan baik dapat dilihat dari beberapa aspek, *pertama* dalam hal pemberian otonomi luas kepada sekolah berjalan dengan baik, ini dapat dilihat masing-masing bidang manajemen (manajemen kurikulum, kesiswaan, sarana dan prasarana dan hubungan masyarakat) semua berjalan dengan baik, masing-masing bidang mampu mengembangkan kegiatan secara otonom penuh sesuai dengan program madrasah.

²²Liza Yulisna dkk, “perencanaan Manajemen Berbasis Sekolah” Email: zyoulanda@ymail.com, FKIP Unila: Jl.Soemantri Brojonegoro No.1, Gedung Meneng, Bandar Lampung

Kedua dalam hal Partisipasi masyarakat dan orang tua di masdrasah ini juga berjalan dengan baik, ini dapat dilihat dari tingkat partisipasi kehadiran wali murid pada saat rapat koordinasi dengan pihak madrasah selalu ikut berperan serta, selain itu masyarakat sekitar juga ikut berperan serta baik dalam pembangunan fisik maupun penciptaan lingkungan yang kondusif, dan perlu diketahui bahwa berdirinya madrasah ini juga inisiatif masyarakat.

Ketiga dalam hal kepemimpinan yang demokratis dan profesional, kepemimpinan di madrasah ini juga sesuai dengan konsep manajemen pendidikan, di mana kepala madrasah dalam mengambil kebijakan apapun selalu melibatkan semua warga sekolah termasuk komite madrasah, tokoh masyarakat sekitar madrasah, wali murid sehingga semua kebijakan yang ada mampu terlaksana dengan baik.

Keempat dalam hal *team work* yang kompak dan transparan, kegiatan ini di madrasah juga terlaksana dengan baik, ini dapat dilihat setiap awal bulan secara terstruktur dilakukan rapat koordinasi selain itu rapat koordinasi juga dilaksanakan secara insidental di luar rapat bulanan. Semua ini tidak lepas dari kemampuan kepala madrasah dalam mengarahkn dan memberikan motivasi semua personil yang ada dalam melaksanakan tugasnya dengan baik.

Dengan beberapa pola manajemen berbasis sekolah di atas madrasah mampu melakukan berbagai layanan pendidikan dengan baik, ini dapat dilihat dari beberapa indikator, *pertama* layanan belajar siswa, kegiatan pembelajaran di madrasah ini berjalan dengan baik dan lancar, ini dapat

dilihat dari aktivitas para guru sudah terprogram dengan baik baik kegiatan intra kurikuler maupun ekstra kurikuler.

Kedua, dalam hal sarana dan prasarana sekolah, madrasah secara optimal memberikan kelengkapan sarana maupun sarana dalam rangka menunjang kegiatan pembelajaran maupun pengembangan bakat dan minat para siswa. *Ketiga*, dalam hal program dan pembiayaan, program kegiatan pada madrasah dilakukan dengan melibatkan semua komponen madrasah yang ada selain itu madrasah juga melakukan penganggaran pada semua program-program yang telah ditetapkan bersama. *Keempat*, dalam hal partisipasi masyarakat dan budaya sekolah. Dengan maksimalnya semua fungsi manajemen madrasah sehingga madrasah mampu memaksimalkan peran masyarakat untuk berperan serta dalam pengembangan madrasah. Selain itu komunikasi antara madrasah dengan lingkungan madrasah juga terbangun dengan baik, ini dapat dilihat dari kegiatan-kegiatan madrasah selalu melibatkan masyarakat dan sebaliknya.²³

B. Tujuan Pendidikan Nasional

1. Visi dan Misi Pendidikan Nasional

Visi dan misi pendidikan nasional telah menjadi rumusan dan dituangkan pada bagian “penjelasan” atas UU 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Visi dan misi pendidikan nasional ini adalah merupakan bagian dari strategi pembaruan sistem pendidikan.

²³Abdulloh Hadziq, “perencanaan Manajemen Berbasis Sekolah (*School Based Management*) dalam mewujudkan Sekolah Efektif (Studi Kasus di MTS NU Sabilul Muttaqin Jepang Mejubo Kudus)” *QUALITY* (Vol. 4, No. 2, 2016), 367-368.

Visi Pendidikan Nasional

Pendidikan nasional mempunyai visi terwujudnya sistem pendidikan sebaga pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.

Misi Pendidikan Nasional

Dengan visi pendidikan tersebut, pendidikan nasional mempunyai misi sebagai berikut:

- a. Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia;
 - b. Membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar;
 - c. Meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral;
 - d. Meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar nasional dan global;
- dan

- e. Memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.²⁴

Berdasarkan visi dan misi pendidikan nasional tersebut, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Sedangkan menurut Mulyasa, Visi makro pendidikan nasional adalah terwujudnya masyarakat madani sebagai bangsa dan masyarakat Indonesia baru dengan tatanan kehidupan yang sesuai dengan amanat proklamasi Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui proses pendidikan. Masyarakat Indonesia baru tersebut memiliki sikap dan wawasan keimanan dan akhlak tinggi, kemerdekaan dan demokrasi, toleransi dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, serta berpengertian dan berwawasan global.²⁵

Sedangkan Visi mikro pendidikan nasional adalah terwujudnya individu manusia baru yang memiliki sikap dan wawasan keimanan dan akhlak tinggi, kemerdekaan dan demokrasi, toleransi dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, saling pengertian dan berwawasan global. Visi makro dan mikro pendidikan nasional dapat dijabarkan melalui misi pendidikan nasional

²⁴Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang SISDIKNAS & Peraturan Pemerintah RI Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Serta Wajib Belajar (Bandung: Citra Umbara, 2016), 39.

²⁵ E. Mulyasa, *Kurikulum Berbasis Kompetensi: Konsep, Karakteristik, dan perencanaan* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), 19.

yang menjangkau rentang waktu jangka pendek, menengah dan panjang sebagai berikut.

Misi makro pendidikan nasional jangka panjang adalah menuju masyarakat madani. Dalam pendidikan penyelenggaraan organisasi pelaksanaan pendidikan yang otonom, luas namun adaptif dan fleksibel, bersifat terbuka dan berorientasi pada keperluan dan kepentingan bangsa. Perimbangan wewenang dan partisipasi masyarakat telah berkembang secara alamiah. Pendidikan telah menyelenggarakan kehidupan masyarakat yang berwawasan global, memiliki komitmen nasional dan bertindak secara lokal menuju kepada keunggulan, serta menjadikan lembaga pendidikan sebagai pusat peradaban.

Misi makro pendidikan nasional jangka menengah adalah pemberdayaan organisasi maupun proses pendidikan. Organisasi pelaksana pendidikan dengan cakupan yang luas dan otonom, sehingga mampu menampung kebutuhan masyarakat dalam berbagai situasi. Proses pendidikan dilaksanakan secara terbuka untuk memperbesar masukan dari masyarakat. Pelaksanaan pendidikan telah dilaksanakan melalui jenjang kewenangan yang telah terbagi dengan partisipasi masyarakat yang besar. Pendidikan diselenggarakan dengan penanaman rasa keunggulan untuk menghadapi tantangan global. Mengusahakan lembaga pendidikan menjadi pusat peradaban.

Misi makro pendidikan nasional jangka pendek adalah mengatasi krisis nasional. Pendidikan dilaksanakan secara efektif dan efisien. Proses pendidikan diusahakan tetap terselenggara secara optimal. Otonomi,

keterbukaan, partisipasi pasar dan memulai menanamkan wawasan keunggulan untuk menghadapi tantangan global. Mulai membentuk lembaga pendidikan untuk menuju pusat peradaban.

Misi mikro pendidikan jangka panjang adalah mempersiapkan individu masyarakat Indonesia menuju masyarakat madani. Pendidikan menghasilkan individu yang mandiri, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, terampil, berteknologi dan mampu berperan sosial. Kurikulum pendidikan dilaksanakan secara terbuka sehingga dapat memenuhi kebutuhan maya dan nyata. Pendidikan menghasilkan manusia berwawasan keteladanan, berkomitmen dan disiplin tinggi.

Misi mikro pendidikan nasional jangka menengah adalah pemberdayaan individu peserta didik maupun institusi. Pengelolaan pendidikan nasional dilaksanakan untuk menuju individu yang mandiri yang tahan dan adaptif terhadap perubahan. Individu yang dihasilkan adalah manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, memiliki keterampilan teknologi dengan kemampuan dalam kehidupan sosial. Menyusun dan melaksanakan kurikulum pendidikan yang bersifat terbuka untuk memenuhi maya dan nyata dalam berbagai situasi. Pendidikan dilakukan untuk menanamkan keteladanan, komitmen dan disiplin tinggi pada pendidik maupun peserta didik.

Misi mikro pendidikan jangka pendek adalah menghasilkan manusia Indonesia yang mampu mengatasi krisis. Individu tersebut beriman dan bertaqwa, berbekal teknologi dan kemampuan sosial dalam mengatasi krisis. Melakukan reformasi kurikulum sehingga bersifat terbuka untuk memenuhi

berbagai kebutuhan dan mengatasi krisis. Mulai menanamkan wawasan keteladanan, komitmen dan disiplin tinggi.

2. Tujuan Pendidikan Nasional

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, disebutkan bahwa tujuan adalah arah; haluan (jurusan); yang dituju; maksud; tuntutan (yang dituntut). Dengan demikian, yang dimaksud dengan tujuan adalah arah yang ingin dicapai atau sesuatu yang dituju.²⁶Pendidikan dari segi bahasa berasal dari kata dasar *didik*, dan diberi awalan *men*, menjadi *mendidik*, yaitu kata kerja yang artinya memelihara dan memberi latihan (ajaran). Pendidikan sebagai kata benda, berarti proses perubahan sikap dan tingkah laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan.²⁷

Istilah pendidikan berasal dari bahasa Yunani, *paedagogy*, yang memiliki arti seorang anak yang pergi dan pulang sekolah dengan diantar oleh seorang pelayan. Awalnya, istilah *paedagogos* berarti pelayan atau pelayanan, tetapi pada perkembangan selanjutnya, *paedagogos* dimaknai sebagai seseorang yang tugasnya membimbing anak pada masa pertumbuhannya sehingga menjadi anak yang mandiri dan bertanggung jawab.²⁸ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, “pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dan usaha

²⁶Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), 317.

²⁷Anas Salahudin, *Filsafat Pendidikan* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 18.

²⁸Hasan Basri, *Kapita Selekta Pendidikan* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 155.

mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan; proses, perbuatan, cara mendidik”.²⁹

Pendidikan adalah segala upaya, latihan dan sebagainya untuk menumbuh kembangkan segala potensi yang ada dalam diri manusia baik secara mental, moral dan fisik untuk menghasilkan manusia yang dewasa dan bertanggung jawab sebagai makhluk yang berbudi luhur.³⁰

Tujuan pendidikan merupakan gambaran dari falsafah atau pandangan hidup manusia, baik secara perorangan maupun kelompok. Membicarakan tujuan pendidikan akan menyangkut sistem nilai dan norma-norma dalam suatu konteks kebudayaan, baik dalam mitos, kepercayaan dan religi, filsafat, ideologi dan sebagainya. Tujuan pendidikan harus mengandung nilai:

- a. *Autonomy*, yaitu memberi kesadaran pengetahuan dan kemampuan secara maksimum kepada individu maupun kelompok untuk dapat hidup mandiri dan hidup bersama dalam kehidupan yang lebih baik;
- b. *Equity* (keadilan), berarti bahwa tujuan pendidikan harus memberi kesempatan kepada seluruh warga masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam kehidupan berbudaya dan kehidupan ekonomi, dengan memberinya pendidikan dasar yang sama;
- c. *Survival*, yang berarti bahwa dengan pendidikan akan menjamin pewarisan kebudayaan dari satu generasi kepada generasi berikutnya.

Oleh sebab itu, maka pendidikan memerlukan landasan filsafat karena masalah pendidikan tidak hanya sebatas pelaksanaan pendidikan, yang hanya terbatas pada pengalaman empiris. Dalam pendidikan akan muncul

²⁹Departemen..., *Kamus...*, 204.

³⁰Siswanto, *Pendidikan Islam dalam Dialektika Perubahan* (Yogyakarta: SUKA-Press, 2012), 9.

permasalahan yang lebih luas, kompleks dan lebih mendalam, yang tidak terbatas oleh pengalaman inderawi maupun fakta-fakta faktual yang mungkin tidak dapat dijangkau oleh sains pendidikan (*science of education*).³¹

Masalah tersebut diantaranya adalah tujuan pendidikan yang bersumber dari tujuan hidup manusia dan nilai sebagai pandangan hidup manusia. Tujuan pendidikan senantiasa berhubungan langsung dengan tujuan hidup dan pandangan hidup individu maupun masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan.

Dalam pendidikan nasional, Pancasila adalah filosofis bangsa, maka filsafat pendidikan yang dikembangkan di Indonesia yang mendasari filsafat pendidikan nasional haruslah berdasar pada Pancasila, hal ini dikarenakan bahwa masalah yang muncul adalah permasalahan-permasalahan warga negara Indonesia yang mempunyai karakter dan sifat khas, maka permasalahan-permasalahan yang muncul diselesaikan secara kekhasan warga negara Indonesia yaitu berdasar pada falsafah bangsa yaitu Pancasila.

Tujuan dari proses pendidikan adalah adanya proses perubahan. Perubahan yang dimaksudkan adalah perkembangan secara alamiah menuju kedewasaan. Makna dari kedewasaan yaitu kematangan yang bersifat biologis, jasmaniah, atau fikir, rasa, dan karsa. Bahkan secara moral, dalam arti bertanggung jawab, sadar dan normatif. Dalam perubahan menuju kematangan tersebut akan timbul bermacam-macam masalah, itulah tugas filsafat.

³¹Sadulloh, *Pengantar Filsafat Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2003), 45.

Tujuan pendidikan menggambarkan tentang idealisme, cita-cita keadaan individu atau masyarakat yang dikehendaki. Karenanya tujuan merupakan salah satu hal yang penting dalam kegiatan pendidikan, sebab tidak saja memberikan arah kemana harus dituju, tetapi juga memberikan arah ketentuan yang pasti dalam memilih materi, metode, alat/media, evaluasi dalam kegiatan yang dilakukan.

Tujuan Pendidikan Nasional dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

Dengan adanya pendidikan, maka akan timbul dalam diri seseorang untuk berlomba-lomba dan memotivasi diri kita untuk lebih baik dalam segala aspek kehidupan. Pada intinya pendidikan itu bertujuan untuk membentuk karakter seseorang yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Akan tetapi disini pendidikan hanya menekankan pada intelektual saja, dengan bukti bahwa adanya UN sebagai tolak ukur keberhasilan pendidikan tanpa melihat proses pembentukan karakter dan budi pekerti anak. Berikut ini merupakan tujuan-tujuan pendidikan nasional:

- a. Tujuan Pendidikan Nasional dalam UUD 1945 (versi Amandemen)
- b. Pasal 31, ayat 3 menyebutkan, “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang

meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.”

- c. Pasal 31, ayat 5 menyebutkan, “Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menunjang tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.”
 - d. Tujuan Pendidikan Nasional dalam UU No. 20, Tahun 2003
 “Jabaran UUD 1945 tentang pendidikan dituangkan dalam Undang-Undang No. 20, Tahun 2003. Pasal 3 menyebutkan, “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.
3. Peranan Manajemen Berbasis Sekolah dalam Mencapai Tujuan Pendidikan Nasional

Sebagaimana yang dituangkan dalam Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003, yang menyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Untuk mencapai tujuan pendidikan nasional tersebut, maka salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan cara memberikan pelayanan pendidikan kepada peserta didik agar dapat mengembangkan potensi yang ada pada dirinya terutama agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa, kemudian berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Pencapaian tujuan pendidikan nasional sebagaimana disebutkan di atas dapat dicapai apabila lembaga pendidikan atau sekolah memiliki manajemen yang baik sehingga terlaksana kegiatan belajar mengajar secara efektif dan efisien. Salah satu manajemen yang dapat diterapkan dalam pencapaian tujuan pendidikan nasional adalah manajemen berbasis sekolah (*school based management*) penerapan *school based manajement* dilakukan dengan melakukan pengelolaan terhadap komponen pendidikan.

Manajemen terhadap kurikulum dan program pengajaran. Kurikulum disusun berdasarkan tujuan yang ingin dicapai oleh sekolah. sehingga susunan mata pelajaran, metode dan cara atau strategi pencapaiannya disusun dan direncanakan dalam kurikulum dan program pengajaran. Dengan tersusun dan terencananya kurikulum dan program pengajaran, maka akan dapat mengarahkan kegiatan kurikulum dan proses pembelajaran untuk mencapai tujuan sekolah.

Selanjutnya adalah manajemen terhadap tenaga kependidikan. Manajemen terhadap tenaga kependidikan dilakukan untuk mengoptimalkan kinerja dan kebutuhan terhadap tenaga pendidik dan kependidikan yang diperlukan. Manajemen ini dimulai dari sistem perekrutan, penempatan, dan evaluasi kinerja harus dilakukan untuk mengefektifkan dan mengefisienkan kebutuhan yang ada. Bukan asal masuk dan mengajar tanpa ada proses penerimaan.

Kemudian adalah manajemen dalam bidang kesiswaan. Manajemen kesiswaan ini dilakukan untuk pengelompokkan dan penempatan para peserta didik sesuai dengan kemampuan dan kompetensi yang dimilikinya. Dengan dilakukannya penataan peserta didik seperti bakat dan minat yang dimiliki oleh peserta didik, maka akan mengarahkan percepatan dalam pencapaian tujuan pendidikan.

Manajemen yang menjadi komponen dalam MBS selanjutnya adalah manajemen dalam bidang keuangan. Keuangan merupakan hal yang paling *sensitive* dalam suatu proses kegiatan. Oleh sebab itu, maka diperlukan pengelolaan keuangan yang transparan dalam keuangan sekolah. Keuangan sekolah harus dapat menentukan target dan pencapaian tujuan seefisien mungkin. Pengelolaan keuangan yang transparan dan seefisien mungkin akan mempermudah dalam mencapai tujuan pendidikan sekolah.

Sarana dan prasarana merupakan komponen yang dibutuhkan dalam kegiatan belajar mengajar, oleh sebab itu, maka perlu dilakukan manajemen terhadap sarana dan prasarana sekolah. Sarana dan prasarana sekolah menjadi alat ukur untuk terlaksananya kegiatan belajar mengajar yang nyaman.

Apabila proses belajar mengajar dapat berjalan dengan nyaman, maka dapat membantu siswa dalam belajar, bila siswa berhasil dalam pencapaian kompetensi belajar, maka tujuan pendidikan sekolah dapat tercapai.

Terakhir adalah manajemen dalam hubungan masyarakat. Hubungan masyarakat ini menjadi media yang menghubungkan antara sekolah dan masyarakat. Humas dibutuhkan oleh sekolah dalam upaya pengembangan sekolah. karena sebuah lembaga pendidikan dapat berkembang apabila berada dan dibutuhkan oleh masyarakat.

Dengan pengelolaan terhadap komponen-komponen yang tersebut di atas, maka akan dapat mencapai tujuan pendidikan sekolah. tercapainya tujuan pendidikan sekolah/institusi merupakan indikator dalam pencapaian tujuan pendidikan nasional. Karena tujuan pendidikan sekolah merupakan anak atau penjabaran dari tujuan pendidikan nasional. perencanaan manajemen pendidikan berbasis sekolah menjadi sebuah pilihan dalam mengembangkan sekolah yang memiliki ke otonomian dalam mengembangkan sekolahnya dengan melibatkan semua anggota atau pihak sekolah yang terkait sampai pada keterlibatan masyarakat. perencanaan dari penerapan paradigma desentralisasi itu adalah di sektor pendidikan. Sektor pendidikan selama ini ditengarai terabaikan dan dianggap hanya sebagai bagian dari aktivitas sosial, budaya, ekonomi dan politik. Akibatnya, sektor pendidikan dijadikan komoditas berbagai variabel di atas oleh para pengambil kebijakan, baik oleh eksekutif maupun legislatif ketika mereka menganggap perlu mengangkat isu-isu kependidikan yang dapat meningkatkan perhatian publik terhadap mereka. Memang ironis dan memprihatinkan ketika bangsa

lain justru menjadikan pendidikan sebagai *leading* sektor pembangunannya, menuju keadilan dan kesejahteraan masyarakatnya.

Begitulah sektor pendidikan ditempatkan selama ini, ia tidak menjadi *leading* sektor dalam perencanaan pembangunan mutu manusia secara nasional. Padahal amanah terpenting dari kemerdekaan bangsa ini adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Seharusnya seluruh perencanaan dan aktivitas apapun yang dilakukan adalah dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pendidikan merupakan salah satu bidang yang desentralisasikan yang berkaitan erat dengan filosofi otonomi daerah. Secara esensial landasan filosofis otonomi daerah adalah pemberdayaan dan kemandirian daerah menuju kematangan dan kualitas masyarakat yang dicita-citakan. Pendidikan merupakan salah satu instrumen paling penting dalam kehidupan manusia. Ia merupakan bentuk strategi budaya tertua bagi manusia untuk mempertahankan berlangsungnya eksistensi mereka.³²

Oleh karenanya, upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitasnya harus dilakukan secara terus menerus. Melalui pendidikan diharapkan pemberdayaan, kematangan, dan kemandirian serta mutu bangsa secara menyeluruh dapat terwujud. Pendidikan merupakan salah satu aspek kehidupan yang bersifat fungsional bagi setiap manusia dan memiliki kedudukan strategis untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Tantangan lainnya yang mempengaruhi pendidikan adalah perubahan yang terjadi akibat semakin mengglobalnya tatanan pergaulan kehidupan

³² F. Wahono, *Kapitalisme Keadilan: antara Kompetisi dan Keadilan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), 1.

dunia saat ini. Di era globalisasi, kebutuhan terhadap sumber daya manusia yang berkualitas tidak bisa ditawar lagi dengan adanya tantangan yang dihadapi yakni persaingan dengan negara lainnya, khususnya negara tetangga di kawasan ASEAN. Padahal saat ini kualitas sumber daya manusia negara kita berdasarkan parameter yang ditetapkan oleh UNDP pada tahun 2000 berada pada peringkat ke-109. Padahal Singapura, Malaysia, Thailand dan Philipina lebih baik peringkatnya.

Dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, kita semua sepakat bahwa pendidikan memegang peran yang sangat penting. Peningkatan kualitas pendidikan merupakan salah satu proses yang terintegrasi dengan proses peningkatan kualitas sumber daya manusia itu sendiri. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan mutu manusia Indonesia melalui pendidikan, dilakukan secara terencana, terarah, intensif, efektif dan efisien, sesuai dengan kebutuhan yang semakin mendesak.

Terminologi pendidikan memiliki ruang lingkup yang luas, meliputi pendidikan persekolahan dan pendidikan luar sekolah. Namun demikian kenyataan menunjukkan bahwa tumpuan utamanya dalam pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan berada pada pendidikan persekolahan. Karena itu, upaya reformasi pendidikan ditujukan untuk memperbaiki sistem pendidikan persekolahan agar dapat menjawab tantangan nasional, regional dan global yang berada di hadapan.

Salah satu pendekatan yang dipilih di era desentralisasi sebagai alternatif peningkatan kualitas pendidikan persekolahan adalah pemberian otonomi yang luas di tingkat sekolah serta partisipasi masyarakat yang tinggi

dalam kerangka kebijakan pendidikan nasional. Pendekatan tersebut dikenal dengan model Manajemen Pendidikan Berbasis Sekolah (MPBS) atau Manajemen Berbasis Sekolah.

Tujuan MBS adalah untuk mewujudkan kemerdekaan pemerintah daerah dalam mengelola pendidikan. Dengan demikian peran pemerintah pusat akan berkurang. Sekolah diberi hak otonom untuk menentukan nasibnya sendiri. Paling tidak ada tiga tujuan dilaksanakannya MBS, yaitu Peningkatan Efisiensi, Peningkatan Mutu, dan Peningkatan Pemerataan Pendidikan.

Dengan adanya MBS diharapkan akan memberi peluang dan kesempatan kepada kepala sekolah, guru dan siswa untuk melakukan inovasi pendidikan. Beberapa keuntungan dengan adanya MBS dalam pendidikan yaitu, kebijakan dan kewenangan sekolah mengarah langsung kepada siswa, orang tua dan guru. Sumber daya yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal. Pembinaan peserta didik dapat dilakukan secara efektif dan dapat mengajak semua pihak untuk memajukan dan meningkatkan pelaksanaan pendidikan.

Dalam upaya pencapaian tujuan pendidikan yang telah ditetapkan pada satuan pendidikan, maka tugas utama yang harus dilakukan adalah dengan penerapan manajemen pendidikan yang dianggap paling efektif dan efisien dalam satuan pendidikan tersebut.

Dalam penerapan MBS, masing-masing pihak memiliki peranannya masing-masing, dalam upaya dukungan dalam tujuan pendidikan nasional. Pihak-pihak yang dimaksud dalam manajemen berbasis sekolah adalah kantor

pendidikan pusat, kantor pendidikan daerah kabupaten atau kota, dewan sekolah, pengawas sekolah, kepala sekolah, orangtua siswa dan masyarakat luas.

- a. Peran Kantor Pendidikan Pusat dan Daerah
- b. Peran Dewan Sekolah dan Pengawas Sekolah
- c. Peran Kepala Sekolah
- d. Peran Para Guru
- e. Peran Para Administrator
- f. Peran Orangtua dan Masyarakat.³³

³³Asbin..., *perencanaan...*, 25.